

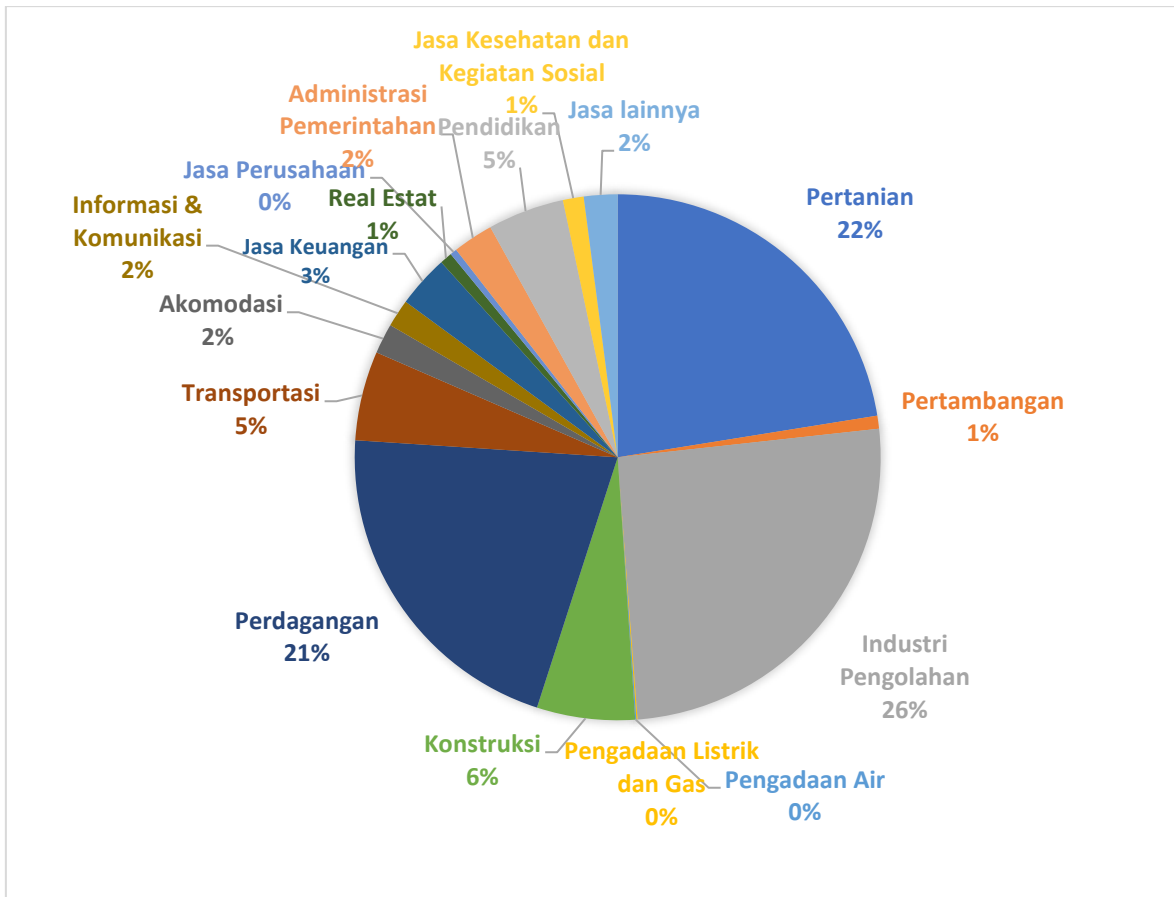
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Permukiman memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011, kawasan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik pada wilayah perkotaan maupun perdesaan, yang berperan sebagai kawasan hunian serta wadah bagi berbagai kegiatan yang mendukung keberlangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pada konteks pembangunan wilayah, permukiman tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai wadah berkembangnya aktivitas sosial para penduduk pada suatu wilayah. Permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga kebutuhannya akan selalu bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, terutama pada wilayah perkotaan yang merupakan pusat aktivitas (Masarmon et al., 2023).

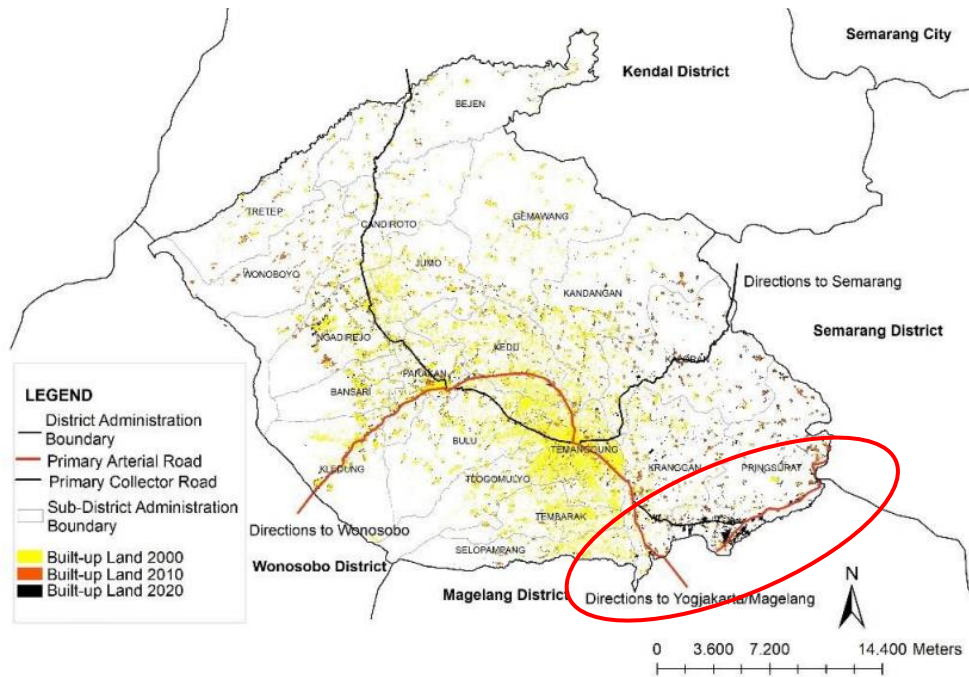
Berdasarkan data BPS 2025, Kabupaten Temanggung memiliki persentasi Tingkat Pengangguran Terbuka terendah kedua di Jawa Tengah sebesar 2,31 %. Tingkat pengangguran terendah di Jawa Tengah dapat mengindikasikan daya serap tenaga kerja yang tinggi, yang akan mendorong kebutuhan hunian. Kemudian dalam tiga dekade terakhir (1990-2020), Kabupaten Temanggung ini mengalami transformasi struktur sektor ekonomi dan diikuti dengan perubahan struktur tenaga kerja. Struktur sektor ekonomi di Kabupaten Temanggung menunjukkan dua kecenderungan utama, yaitu sektor pertanian mengalami penurunan kontribusi sebesar 9% dari 1990-2020 dan sektor industri mengalami peningkatan kontribusi sebesar 11%. Hal tersebut juga diikuti dengan perubahan struktur ketenagakerjaan, data BPS menunjukkan bahwa pada periode 1990–2018 jumlah tenaga kerja sektor industri meningkat dari 4.544 menjadi 87.971 pekerja (Wijaya, 2022). Kecenderungan antara sektor industri dan pertanian terus berlanjut hingga tahun 2024, tertuang pada distribusi PDRB berdasarkan harga pasar berikut.



Sumber: BPS Kab. Temanggung, 2025

Gambar 1. 1 Distribusi Sektor PDRB Harga Berlaku Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan diagram diatas, sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dalam perencanaan wilayah yang mendukung perekonomian terutama di sektor industri. Hal tersebut sesuai dengan tujuan perencanaan Kabupaten Temanggung pada RTRW 2024-2044 yaitu “mewujudkan Ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri dan pariwisata dalam kesatuan sistem wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan” (Bappeda Kabupaten Temanggung, 2024). Berdasarkan peraturan tersebut, Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Temanggung direncanakan pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat.



Sumber : Wijaya, 2022

Gambar 1. 2 Perubahan Lahan Terbangun

Kecamatan Kranggan dan Pringsurat ditetapkan sebagai kawasan strategis pusat agribisnis dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2044 Pasal 36 (Bappeda Kabupaten Temanggung, 2024). Setelah penetapan tersebut perkembangan kawasan industri di Kecamatan Kranggan dan Pringsurat tercermin dari perubahan penggunaan lahan pada Gambar 1.1 diatas. Perubahan penggunaan lahan Kabupaten Temanggung yang paling signifikan terjadi di Kecamatan Pringsurat pada periode 1990–2000 sebesar 440,07% dan 2010–2020 sebesar 249,19%. Kecamatan Kranggan juga mengalami peningkatan kawasan terbangun tertinggi pada periode 2010–2020 sebesar 152,56% (Wijaya, 2022). Perubahan penggunaan lahan tersebut disebabkan oleh pemenuhan sarana dan prasarana penunjang industri termasuk penyediaan permukiman.

Perkembangan kawasan industri tidak hanya meningkatkan kebutuhan ruang untuk aktivitas produksi, tetapi juga mendorong peningkatan kebutuhan ruang hunian bagi tenaga kerja. Bertambahnya aktivitas industri berpotensi meningkatkan mobilitas dan konsentrasi penduduk di sekitar kawasan industri, baik melalui pertumbuhan penduduk alami maupun migrasi masuk tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan lahan permukiman di Kecamatan Kranggan dan Pringsurat diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan Kawasan Peruntukan Industri. Apabila kebutuhan permukiman tersebut tidak diantisipasi melalui perencanaan yang tepat, maka perkembangan hunian berpotensi tidak

terkendali. Perkembangan permukiman cenderung berlangsung mengikuti dinamika pasar dan pertumbuhan ekonomi tanpa didukung kajian spasial yang komprehensif. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan apabila tidak diikuti dengan perencanaan permukiman yang terpadu (Musyafa, 2023). Tanpa adanya arahan pengembangan yang jelas dan terukur, perluasan kawasan permukiman dapat memicu berbagai dampak negatif diantaranya, terjadi konversi lahan produktif pertanian, terciptanya permukiman kumuh, hingga terjadi bencana (Pradani et al., 2017).

Dengan demikian, penelitian mengenai "Arahan Pengembangan Permukiman di Kecamatan Kranggan dan Pringsurat Terhadap Rencana Kawasan Peruntukan Industri RTRW Kabupaten Temanggung 2024-2044" menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan menganalisis proyeksi kebutuhan permukiman berdasarkan pertumbuhan penduduk, mengevaluasi kesesuaian lahan untuk pengembangan permukiman menggunakan metode Multi Criteria Analysis berbasis SIG, dan memetakan ketersediaan lahan potensial permukiman, serta merumuskan arahan pengembangan permukiman yang berkelanjutan. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengembangan permukiman yang berkelanjutan, selaras dengan amanat pada RTRW Kabupaten Temanggung 2024-2044.

1.2 Rumusan Permasalahan

Transformasi struktur ekonomi wilayah yang ditandai dengan meningkatnya peranan sektor industri serta lonjakan kawasan terbangun di Kecamatan Kranggan dan Pringsurat menunjukkan adanya tekanan terhadap kebutuhan lahan permukiman. Penetapan kedua kecamatan sebagai Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dalam RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024–2044 memperkuat kecenderungan perubahan pemanfaatan ruang. Namun, hingga saat ini belum tersedia arahan pengembangan permukiman yang berbasis kesesuaian lahan yang terintegrasi dengan rencana KPI. Ketiadaan arahan tersebut berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang, konversi lahan pertanian produktif, serta degradasi lingkungan. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang mampu merumuskan arahan pengembangan permukiman yang selaras dengan rencana kawasan industri dan kebijakan tata ruang wilayah.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan Arahan Pengembangan Permukiman di Kecamatan Kranggan dan Pringsurat Terhadap Rencana Kawasan Peruntukan Industri

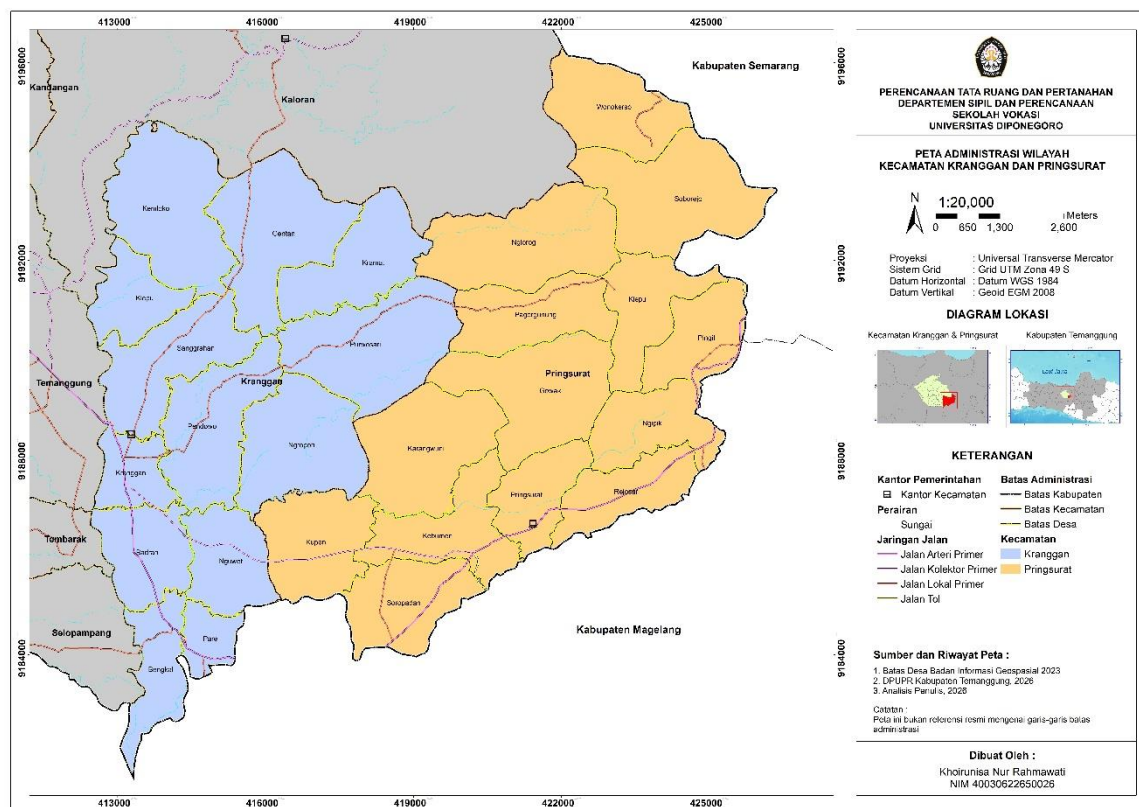
RTRW Kabupaten Temanggung 2024-2044. Adapun sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

1. Analisis kebutuhan lahan kawasan permukiman di Kecamatan Kranggan dan Pringsurat.
2. Analisis kesesuaian lahan kawasan permukiman di Kecamatan Kranggan dan Pringsurat.
3. Analisis ketersediaan lahan kawasan permukiman di Kecamatan Kranggan dan Pringsurat.
4. Arahan pengembangan kawasan permukiman di Kecamatan Kranggan dan Pringsurat.

1.4 Ruang Lingkup .

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Pemilihan kedua kecamatan tersebut didasarkan pada penetapannya sebagai Kawasan Peruntukan Industri dalam RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024–2044. Selain itu, perkembangan kawasan terbangun yang cukup pesat di kedua kecamatan menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan ruang, khususnya permukiman, sehingga relevan untuk dikaji dalam arah pengembangan permukiman yang berkelanjutan. Kecamatan Kranggan terdiri dari 13 desa sedangkan Kecamatan Pringsurat terdiri dari 14 desa. Adapun lokasi dan sebaran desanya dapat digambarkan pada peta berikut.



Sumber : Penulis, 2026

Gambar 1. 3 Peta Administrasi Kecamatan Kranggan dan Pringsurat

Berdasarkan peta administrasi diatas, Kecamatan Kranggan dan Pringsurat berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Utara : Kecamatan Kaloran dan Kabupaten Semarang
2. Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang
3. Selatan: Kabupaten Magelang
4. Barat : Kecamatan Selopampang, Tembarak, Temanggung, Kaloran.

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi berisi materi apa saja yang akan dikaji beserta apa yang membatasi substansi yang dikaji. Selain itu juga menjelaskan alasan pembatasan dari materi tersebut.

1. Analisis Kebutuhan Lahan Permukiman

Pada analisis ini dilakukan perhitungan kebutuhan lahan kawasan permukiman berdasarkan proyeksi penduduk menggunakan metode *Backlog*, untuk mengetahui luasan lahan yang dibutuhkan dengan dikalikan dengan standar kebutuhan kavling. Kemudian dilakukan juga perhitungan kebutuhan lahan dari pekerja industri.

2. Analisis Kesesuaian Lahan

Analisis Kesesuaian Lahan melibatkan proses evaluasi sistematis terhadap karakteristik fisik (seperti topografi, geologi, dan hidrologi), lingkungan (risiko bencana dan konservasi), serta kriteria sosial-ekonomi (aksesibilitas) dari suatu unit lahan. Analisis ini dilakukan menggunakan pendekatan spasial, dengan skoring dan pembobotan yang dihasilkan dari perhitungan menggunakan *Pairwise Comparison Matrix (PCM)*. Variabel yang digunakan mengacu pada Permen PU No 41/PRT/M2007 tentang Pedoman Teknis Kawasan Budidaya, pada kriteria lokasi kawasan permukiman.

3. Analisis Ketersediaan Lahan Permukiman

Analisis ini dilakukan menggunakan pendekatan spasial, dengan melakukan limitasi pada hasil kesesuaian lahan kawasan permukiman di Kecamatan Kranggan. Kemudian dengan faktor limitasi lahan yang berupa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kawasan lindung, dan kawasan lain yang dilarang terdapat bangunan menurut regulasi yang berlaku. Kemudian hasil lahan yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan lahan pada setiap desa. Sehingga dapat mengidentifikasi defisit (kekurangan) atau surplus (kelebihan) luas lahan untuk fungsi permukiman, serta memetakan secara spesifik lokasi di mana kesenjangan tersebut terjadi, yang selanjutnya menjadi dasar perumusan arahan pengembangan.

4. Arahan pengembangan kawasan permukiman

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diketahui bagaimana kemampuan ataupun kapasitas permukiman di Kecamatan Kranggan. Arahan ini disesuaikan dengan tingkat prioritas yang telah dihasilkan pada analisis sebelumnya.

1.5 Tahapan/Proses

Proses analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat tahap, yaitu tahap Persiapan, Pengumpulan data, Proses, dan Output sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan dilakukan studi literatur terkait penelitian terdahulu ataupun regulasi terkait permasalahan yang akan diteliti. Kemudian dilakukannya identifikasi permasalahan dan pembuatan kerangka berpikir yang berisikan alur proses penelitian. Selanjutnya dilakukan studi mengenai pemilihan variabel yang akan digunakan dalam penelitian melalui studi literatur dan regulasi. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi analisis dan pemilihan metode yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian.

2. Tahapan pengumpulan data

Pada tahap ini penulis melakukan identifikasi kebutuhan data yang diperlukan untuk pengolahan data baik data numerik ataupun data spasial. Identifikasi mengenai kebutuhan data dilakukan melalui studi literatur terkait topik yang diteliti, yaitu arahan pengembangan permukiman. Setelah menentukan kebutuhan data penelitian, penulis dapat melakukan pengumpulan data baik secara primer ataupun sekunder. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui telaah dokumen dan permohonan data pada instansi terkait. Namun dibutuhkan pengumpulan data sebagai validasi hasil pengolahan, dengan observasi lapangan

3. Proses

Pada tahap pengolahan data, terdapat empat analisis yang dilakukan sesuai dengan sasaran penelitian ini. Analisis pertama yang dilakukan adalah analisis mengenai kebutuhan lahan permukiman dengan menggunakan *Excel*. Analisis tersebut dilakukan dengan menghitung luasan kebutuhan lahan menggunakan metode Backlog berdasarkan proyeksi jumlah penduduk. Selanjutnya terdapat analisis kesesuaian lahan dengan menggunakan metode *Spatial Multy Criteria Analysis (SMCA)* yang terdiri dari Pembobotan dan Overlay untuk mengetahui lokasi yang potensial untuk dijadikan permukiman. Kemudian selanjutnya dilakukan analisis ketersediaan lahan, dengan mengeliminasi faktor limitasi pada hasil analisis kesesuaian lahan yang telah dihasilkan. Kedua analisis ini menggunakan *software Arcmap 10.8* sebagai alat analisisnya. Analisis keempat yaitu analisis gap antara ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan di Kabupaten Temanggung. Analisis terakhir yaitu analisis arahan pengembangan permukiman yang akan menghasilkan luaran sesuai tujuan penelitian.

4. Output

Hasil yang didapatkan dari rangkaian proses analisis yang dilakukan adalah arahan lokasi pengembangan permukiman di Kecamatan Kranggan dan Pringsurat tahun 2044, sesuai dengan RTRW Kabupaten Temanggung 2024-2044.

1.6 Metode dan Hasil Akhir

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, dilakukan pengumpulan data-data yang akan digunakan dalam analisis. Data tersebut diidentifikasi berdasarkan kebutuhan setiap analisis yang dilakukan pada penelitian, adapun tabel kebutuhan data dapat dilihat di lampiran. Pengumpulan data yang dilakukan dibagi menjadi dua, yaitu pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data primer. Berikut ini metode pengumpulan data yang akan dilakukan.

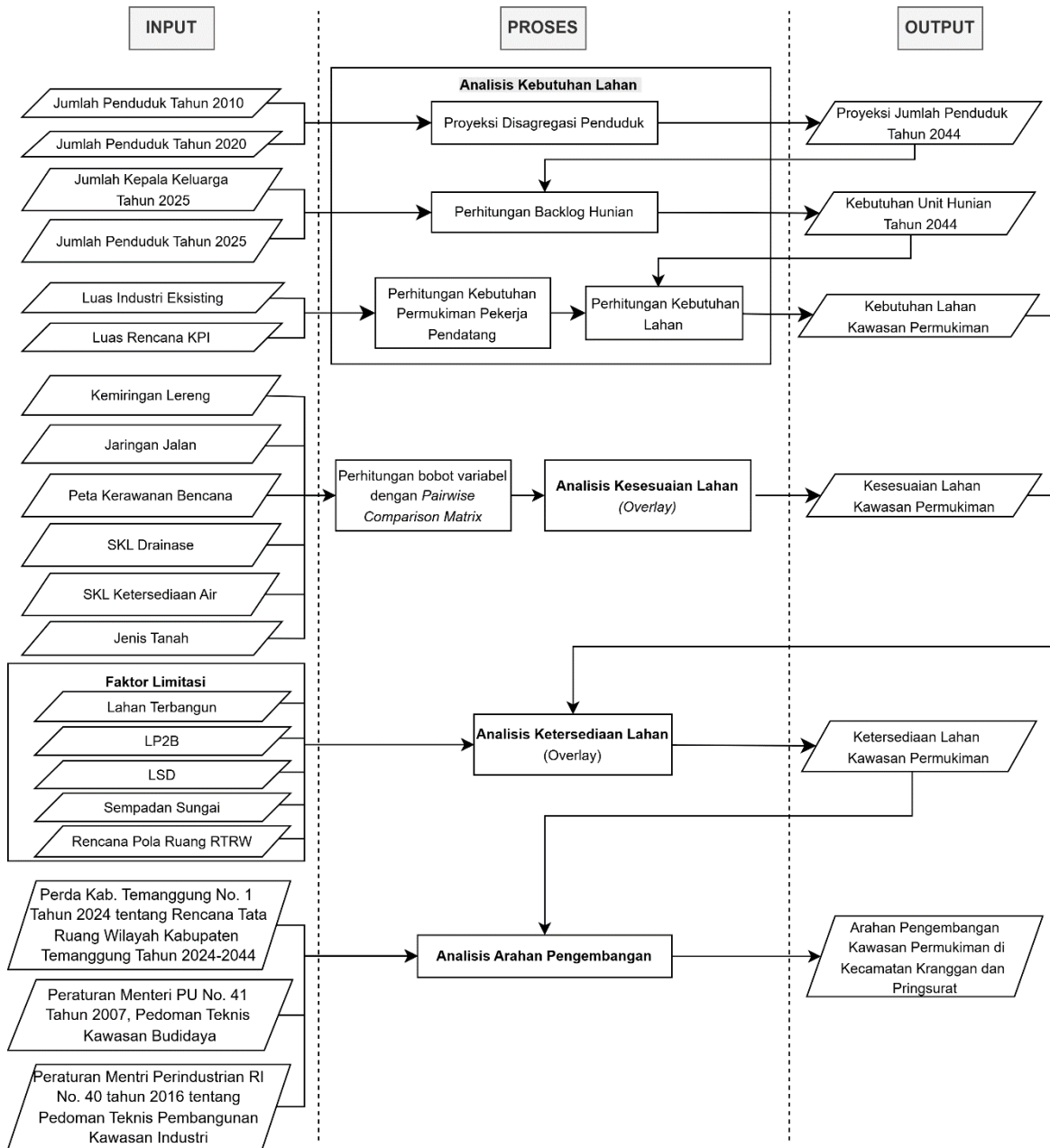
1. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang akan dilakukan melalui telaah dokumen publikasi dari instansi dan permohonan data pada instansi terkait. Pada penelitian ini instansi yang berperan banyak dalam penyediaan data adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung. Proses permohonan data akan dilakukan dengan mengajukan surat permohonan data dari fakultas beserta dengan rincian tabel kebutuhan datanya.

2. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer atau data lapangan dilakukan melalui wawancara survey observasi lapangan. Wawancara dilakukan pada stakeholder yang merupakan ahli pada bidang perencanaan permukiman, yang bertujuan untuk dasar perhitungan bobot kesesuaian lahan permukiman. Selanjutnya observasi yang dilakukan bertujuan untuk memvalidasi data pengolahan yang sudah dihasilkan oleh penulis. Observasi dilakukan pada beberapa sampel yang disebar ke seluruh wilayah studi, dengan jumlah sampel 50 titik dan yang disebar secara *purposive sampling* berdasarkan distribusi spasial dan mempertimbangkan kemudahan aksesnya.

1.6.2 Teknik Analisis



Sumber : Penulis, 2026

Gambar 1. 4 Teknik Analisis

1. Analisis Kebutuhan Lahan

Analisis kebutuhan lahan merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui luasan lahan yang akan dibutuhkan pada tahun perencanaan. Pada analisis ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan analisis proyeksi penduduk dan analisis backlog perumahan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai dua pendekatan yang digunakan.

a) Analisis Proyeksi Penduduk

Analisis proyeksi penduduk merupakan metode ilmiah untuk memperkirakan jumlah dan karakteristik penduduk di masa mendatang berdasarkan data historis serta serangkaian asumsi rasional mengenai perkembangan faktor demografi seperti kelahiran, kematian, dan migrasi (Karyana & Rusliana, 2021). Analisis proyeksi penduduk yang akan dilakukan menggunakan metode agregat berdasarkan jumlah penduduk pada tahun sensus yaitu tahun 2010 dan 2020, dikarenakan jumlah penduduk pada tahun tersebut merupakan data asli dari lapangan. Kemudian dilakukan perhitungan pertumbuhan penduduk, untuk mengetahui jumlah penduduk pada tahun yang direncanakan.

b) Analisis Kebutuhan Rumah Tahun Perencanaan (Backlog)

Analisis kebutuhan rumah atau bisa disebut dengan backlog rumah, yang merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kebutuhan rumah di Indonesia. Backlog perumahan dapat dihitung melalui dua pendekatan, yaitu berdasarkan tingkat kependhunian dan berdasarkan kepemilikan. Penghitungan backlog dari sisi kependhunian didasarkan pada prinsip ideal bahwa satu keluarga menempati satu rumah (Widyawati, 2018). Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung backlog dari perspektif kependhunian adalah: $\text{Backlog} = \text{Jumlah Keluarga} - \text{Jumlah Rumah}$.

Berdasarkan PP No. 12 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat perbandingan antara rumah mewah, rumah menengah dan rumah. Perbandingan ketiga kelas rumah tersebut adalah 1:2:3, yaitu 1 rumah mewah : 2 rumah menengah : 3 rumah sederhana. Kemudian jumlah kebutuhan rumah tersebut dikalikan dengan luasan setiap klasifikasi rumah berdasarkan Keputusan Menteri Perpraswil No 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Umum Rumah Sederhana Sehat.

Tabel 1. 1 Komposisi Rumah dan Luas Rumah

Jenis	Rumah Mewah	Rumah Menengah	Rumah Sederhana
Perbandingan	1	2	3
Luas	200m ²	120m ²	60m ²

Sumber : Kepmen Perpraswil No. 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Umum Rumah Sederhana Sehat

c) Kebutuhan Lahan Tenaga Kerja Industri

Berdasarkan Permen Perindustrian No 40/M-Ind/Per/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri, ketersediaan lahan untuk kawasan industri harus memperhatikan kebutuhan lahan perumahan dan kegiatan permukiman dan perkotaan lainnya. Diilustrasikan perhektar kawasan industry menyerap 100 tenaga kerja, berarti dibutuhkan lahan perumahan sekitar 1-1,5 hektar untuk tempat tinggal pekerja. Pada

peraturan tersebut juga diasumsikan kawasan industry dengan luas 100 hektar yang menyerap tenaga kerja sebanyak 10.000 jiwa memiliki komposisi tenaga kerja sebagai berikut :

- a) Manajer sebesar 3% atau 300 orang,
- b) Staf 20% atau 2.000 orang, dan
- c) Buruh 7.700 orang yang terdiri dari penduduk lokal 500 (6%) dan 7.200 (94%) adalah buruh pendatang.

Setelah diketahui jumlah perkerja yang berada dari luar wilayah (pendatang) maka dapat dihitung luas kebutuhan perumahan untuk tenaga kerja khususnya buruh. Mengacu pada SNI 03-1733-2004 mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, diterangkan bahwa kebutuhan luas lantai minimum hunian per jiwa bagi orang dewasa adalah sebesar 9,6 m².

2. Analisis Kesesuaian Lahan

Analisis ini berfokus pada sisi *supply* lahan, yaitu menilai potensi lahan yang memenuhi kriteria teknis dan ekologis untuk pembangunan permukiman. yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari Peraturan Menteri Pekerjaan umum No 41/PRT/M2007 tentang Pedoman Teknis Kawasan Budidaya. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan *Spatial Multy Criteria Anlysis (SMCA)* melalui skoring dan pembobotan pada software SIG. Pada perumusan skor setiap kriteria bersumber pada artikel dan jurnal terdahulu, sedangkan bobot antar variabelnya digunakan berdasarkan hasil wawancara kepada stakeholder yang berhubungan dengan kawasan permukiman yang kemudian dihitung menggunakan *Pairwise Comparison Matrix*. Setelah mendapatkan bobot dari setiap variabel dilakukan *Weighted Overlay* menggunakan *Arcmap 10.8*.

3. Analisis Ketersediaan Lahan

Analisis Ketersediaan lahan melalui faktor pembatas dilakukan untuk mengidentifikasi area-area yang secara hukum, kebijakan, atau regulasi tidak diperbolehkan untuk dibangun, meskipun dari aspek fisik mungkin tergolong sesuai. Analisis ini menggunakan *Constraint Overlay* untuk membatasi wilayah yang tidak diperkenankan menjadi permukiman. Pada overlay ini wilayah yang termasuk dalam faktor limitasi akan diberi skor 0 dan wilayah lainnya diberi skor 1. Sehingga skor masing-masing kesesuaian lahan akan menjadi 0 ketika overlap dengan factor limitasi daan menghasilkan wilayah yang tersedia untuk

pengembangan permukiman. Klasifikasi yang dapat digunakan untuk permukiman merupakan 2 klasifikasi tertinggi dari hasil kesesuaian lahan.

Hasil ketersediaan lahan selanjutnya dikurangi dengan luasan kebutuhan lahan, sehingga dapat diketahui status ketersediaan lahan permukimannya. Melalui analisis ini, dapat diketahui apakah wilayah tersebut mengalami surplus atau defisit lahan permukiman. Apabila hasil perhitungan menunjukkan nilai positif, maka Kecamatan Kranggan dan Pringsurat mengalami surplus lahan permukiman, yang berarti ketersediaan lahan lebih besar daripada kebutuhan. Sebaliknya, apabila nilai negatif, berarti wilayah tersebut mengalami defisit lahan, atau ketersediaan lahan tidak mencukupi kebutuhan yang ada.

4. Arahan Pengembangan Permukiman

Analisis arahan pengembangan permukiman merupakan tahap sintesis yang bertujuan untuk merumuskan arah dan strategi pengembangan permukiman di Kecamatan Kranggan berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan spasial, dengan menginterpretasikan hasil overlay peta serta perhitungan gap lahan. Hasil dari analisis ini menghasilkan Peta Arahan Pengembangan Permukiman Kecamatan Kranggan dan Pringsurat, yang menampilkan lokasi-lokasi prioritas pengembangan dengan klasifikasi zona potensial pengembangan tinggi, potensial pengembangan, dan kurang potensial.

1.6.3 Hasil Akhir

Hasil akhir dari penelitian ini berupa arahan pengembangan permukiman di Kecamatan Kranggan dan Pringsurat. Produk yang dihasilkan dalam proses analisis ini antara lain :

1. Kebutuhan Lahan Permukiman Kecamatan Kranggan dan Pringsurat 2044
2. Kesesuaian Lahan Potensial Permukiman Kecamatan Kranggan dan Pringsurat
3. Ketersediaan Lahan Potensial Permukiman Kecamatan Kranggan dan Pringsurat
4. Arahan Pengembangan Permukiman Kecamatan Kranggan dan Pringsurat